

PENGELOLAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SMP SSN
(Situs Studi : SMP 1 Randublatung Kabupaten Blora)

TESIS

Diajukan kepada :
Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar
Magister Pendidikan



Oleh :

SLAMET WIYONO
NIM : Q 100080031

Program Studi : Magister Manajemen Pendidikan
Konsentrasi : Manajemen Sistem Pendidikan

PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2010

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa perubahan di hampir semua aspek kehidupan manusia sehingga berbagai permasalahan hanya dapat dipecahkan dengan upaya penguasaan dan peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi (Sukmadinata, 2006:10). Selain bermanfaat bagi kehidupan manusia, perubahan tersebut juga telah membawa manusia ke dalam era persaingan global yang semakin ketat. Agar mampu berperan dalam persaingan global, maka sebagai bangsa kita perlu terus mengembangkan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Oleh karena itu, peningkatan sumber daya manusia merupakan kenyataan yang harus dilakukan secara terencana, terarah, intensif, efektif, dan efisien dalam proses pembangunan, kalau tidak ingin bangsa ini kalah bersaing dalam menghadapi era globalisasi.

Salah satu tujuan pembangunan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa melalui sistem pendidikan nasional yang berkualitas, yang melahirkan sumber daya manusia (SDM), handal, berakhlak mulia, mampu bekerjasama dan bersaing di era globalisasi. Melalui Pendidikan diharapkan dapat membentuk manusia berkualitas yang mendukung tercapainya pembangunan nasional. Syafarudin (2005:22) mengutip pendapat Sceffler bahwa *“Education is social institution created and maintained by a society in*

order to perpetuate certain aspect of its culture through purposeful and learning”.

Sebagai institusi sosial, keberadaan sekolah berfungsi untuk menjalankan proses enkulturasi masyarakat yang bertumpu pada aktivitas belajar mengajar. Selain itu pendidikan juga merupakan investasi yang sangat penting dan *urgent* dalam pembangunan.

Peningkatan kualitas pendidikan merupakan suatu proses yang terintegrasi dengan proses peningkatan kualitas sumber daya manusia itu sendiri. Mengingat pentingnya pendidikan dalam peningkatan sumber daya manusia maka pendidikan menjadi kebutuhan pokok bagi setiap manusia dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebagai konsekuensinya, negara berkewajiban mengatur pendidikan secara nasional.

Negara mengatur pendidikan melalui Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS). Pada bab II tentang dasar, fungsi, dan tujuan pada pasal 2 dan 3 menyebutkan :

Pendidikan Nasional berdasar Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Dasar, fungsi, dan tujuan pendidikan tersebut bila diterapkan dengan baik dalam lembaga pendidikan atau sekolah tentu akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang handal dan profesional dalam bidangnya.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) juga mengatur tentang hak warga negara dan kewajiban pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan. Dalam bab IV pasal 5 ayat 1 disebutkan : *"Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu"* dan pasal 11 ayat 1 yaitu : *"Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi"*. Di sini jelas bahwa setiap warga negara berhak akan pendidikan yang bermutu dan pemerintah berkewajiban untuk menyediakan pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara. Permasalahannya adalah apakah pendidikan yang ada telah memenuhi harapan dalam menghadapi tantangan global.

Banyak masalah mutu dihadapi dalam dunia pendidikan saat ini. Mutu-mutu tersebut diantaranya terkait dengan mutu manajerial para pimpinan pendidikan, keterbatasan dana, sarana dan prasarana, fasilitas pendidikan, media, sumber belajar, alat dan bahan latihan, iklim sekolah, lingkungan pendidikan, serta dukungan dari pihak-pihak yang terkait dengan pendidikan. Semua kelemahan mutu dari komponen-komponen pendidikan tersebut berujung pada rendahnya mutu lulusan.

Sebagaimana yang dikutip oleh Asmani (2009:31) yang diperoleh dari laporan UNDP tentang Human Development Index (HDI-UNDP) tahun 2000 menempatkan mutu pendidikan Indonesia pada peringkat ke 109 dunia, tahun 2004 turun menjadi peringkat 111, tahun 2005 naik satu point dan berada pada peringkat 110 dari 177 negara (*Human development index (HDI) Reuters AlertNet-Indonesia*). Rendahnya mutu pendidikan Indonesia ini diperkuat hasil survey *Political and Economic Risk Consulat* (PERIC) yang menempatkan mutu pendidikan di Indonesia berada pada urutan paling bawah, yaitu ke-12 dari 12 negara di Asia.

Rendahnya mutu pendidikan di Indonesia juga disampaikan Fasli Jalal, dalam makalah Seminar Sehari Implementasi Undang-Undang Guru dan Dosen (2006), bahwa Perbandingan Internasional Prestasi Literasi Membaca Indonesia berada pada urutan 39 dari 41 negara peserta. Perbandingan Internasional Prestasi Literasi IPA Indonesia pada urutan 38 dari 41 negara. Perbandingan Internasional Prestasi Literasi Matematika berada pada urutan 39 dari 41 negara peserta (*Programme for International Student Assessment (PISA) 2003*).

Menurut Syafarudin (2005:14) faktor yang menyebabkan mutu pendidikan rendah terletak pada unsur-unsur dari sistem pendidikan itu sendiri, yaitu faktor kurikulum, sumber daya ketenagaan, sarana prasarana dan fasilitas, manajemen sekolah, pembiayaan, dan kepemimpinan. Mutu lulusan yang rendah dapat menimbulkan berbagai masalah. Masalah tersebut seperti lulusan tidak dapat melanjutkan studi, tidak dapat menyelesaikan studinya pada jenjang yang lebih tinggi, tidak dapat bekerja atau tidak diterima di dunia kerja, diterima kerja

tapi tidak berprestasi, tidak dapat mengikuti perkembangan masyarakat, dan tidak produktif. Lulusan yang tidak produktif akan menjadi beban masyarakat, menambah biaya kehidupan dan kesejahteraan masyarakat, serta memungkinkan menjadi warga yang tersisih dari masyarakat.

Paradigma pendidikan input-proses-output, telah menjadikan sekolah bagaikan proses produksi. Murid diperlakukan bagaikan raw-input dalam suatu pabrik. Guru, kurikulum, dan fasilitas diperlakukan sebagai instrumental input. Jika raw-input dan instrumental input baik, maka akan menghasilkan proses yang baik dan akhirnya baik pula produk yang dihasilkan (Zamroni, 2003:3). Menurut S. Arikunto & Lia Yuliana, dalam buku *Manajemen Pendidikan* (2008:58), menyatakan, penerimaan siswa baru merupakan peristiwa penting bagi suatu sekolah, karena peristiwa ini merupakan titik awal yang menentukan kelancaran tugas suatu sekolah.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan untuk meningkatkan mutu pendidikan, penerimaan siswa baru merupakan langkah awal yang penting di sekolah. Jika murid sebagai input baik di dukung instrumen (guru, kurikulum, dan fasilitas) yang baik disertai proses yang baik pula maka akan diperoleh output atau lulusan yang baik pula. Input atau siswa yang baik dapat diperoleh jika calon peserta didik baru yang mendaftar melebihi kuota, sehingga siswa yang diterima benar-benar terseleksi.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 menyebut Standar Nasional Pendidikan mencakup standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana-prasarana, manajemen, pembiayaan, dan penilaian

pendidikan. Selanjutnya ketentuan tentang Standar Nasional Pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 lebih jauh telah dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Untuk memudahkan bagi sekolah maupun masyarakat dalam memahami wujud sekolah yang telah memenuhi Standar Nasional Pendidikan tersebut, diperlukan contoh Sekolah Standar Nasional (SSN) pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Coombes (dalam Ihsan, 2005:41) mengklasifikasikan pendidikan ke dalam tiga bagian, yaitu pendidikan formal (pendidikan sekolah), pendidikan informal (pendidikan luar sekolah yang tidak dilembagakan), dan pendidikan non formal (pendidikan luar sekolah yang dilembagakan). Ketiga jenis lembaga tersebut mempunyai kedudukan yang sama penting dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Hal ini senada dengan apa yang termuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) bab VI pasal 13 ayat 1 menyebutkan bahwa dalam pelaksanaannya jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, non formal, dan informal. Ketiga jalur pendidikan itu dapat saling melengkapi dan memperkaya.

SMP 1 Randublatung yang terletak di Jalan Diponegoro No. 19 Randublatung Telp. (0296) 810020 KP.58382 Blora sebagai lembaga pendidikan formal. Berdasarkan Surat Keputusan Direktur PLP No. 960/C3/KP/2005 Tanggal 19 Juli 2005 SMP 1 Randublatung Kabupaten Blora dinyatakan sebagai

Sekolah Standar Nasional (SSN). Sampai tahun pelajaran 2009/2010 SMP 1 Randublatung merupakan satu-satunya Sekolah Standar Nasional (SSN) di Kecamatan Randublatung, yaitu sekolah yang hampir atau sudah memenuhi standar nasional pendidikan. Selama tiga tahun terakhir jumlah pendaftar siswa baru di SMP 1 Randublatung selalu melebihi daya tampung. Berikut ini data Penerimaan Peserta Didik Baru empat SMP Negeri di Kecamatan Randublatung tiga tahun terakhir.

Tabel : 1.1
DATA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
SMP NEGERI KECAMATAN RANDUBLATUNG

No	Sekolah	2006/2007			2007/2008			2008/2009		
		DT	Daf	Trm	DT	Daf	Trm	DT	Daf	Trm
1	SMP 1	280	558	280	280	497	280	274	420	274
2	SMP 2	160	156	150	160	144	144	160	132	132
3	SMP 3	160	158	148	160	152	152	160	155	155
4	SMP 4	120	88	88	120	87	87	120	92	92

Keterangan : DT = Daya Tampung

Daf = Jumlah siswa yang mendaftar

Trm = Jumlah siswa yang diterima

(Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Blora, 2009).

Gambaran yang diuraikan di atas mendorong keinginan penulis untuk mengetahui, memahami dan mendeskripsikan secara jelas fakta yang terjadi di lapangan tentang pengelolaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMP 1 Randublatung Kabupaten Blora.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini, “Bagaimana karakteristik pengelolaan Penerimaan Peserta Didik Baru di SMP 1 Randublatung Kabupaten Blora ?” Fokus tersebut dirinci menjadi tiga subfokus.

1. Bagaimana karakteristik promosi Penerimaan Peserta Didik Baru di SMP 1 Randublatung Kabupaten Blora ?
2. Bagaimana karakteristik seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru di SMP 1 Randublatung Kabupaten Blora ?
3. Bagaimana karakteristik pelaporan Penerimaan Peserta Didik Baru di SMP 1 Randublatung Kabupaten Blora ?

C. Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran empirik tentang karakteristik pengelolaan Penerimaan Peserta Didik Baru di SMP 1 Randublatung Kabupaten Blora. Secara khusus penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan tiga hal.

1. Untuk mendeskripsikan karakteristik promosi Penerimaan Peserta Didik Baru di SMP 1 Randublatung Kabupaten Blora.
2. Untuk mendeskripsikan karakteristik seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru di SMP 1 Randublatung Kabupaten Blora.
3. Untuk mendeskripsikan karakteristik pelaporan Penerimaan Peserta Didik Baru di SMP 1 Randublatung Kabupaten Blora.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara konseptual teoritis maupun secara praktis di lapangan.

1. Manfaat Teori

- a. Memberikan Sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya pengetahuan tentang pengelolaan Penerimaan Peserta Didik Baru di SMP 1 Randublatung Kabupaten Blora.
- b. Memberikan informasi tentang model Pengelolaan Penerimaan Peserta Didik Baru di SMP 1 Randublatung Kabupaten Blora.
- c. Sebagai bahan referensi bagi penelitian-penelitian sejenis selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi tenaga kependidikan dan penyelenggara program pendidikan formal, hasil penelitian diharapkan mampu memberi masukan khususnya dalam mengelola Penerimaan Peserta Didik Baru.

- b. Bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Blora, hasil penelitian dapat memberikan gambaran tentang model Pengelolaan Penerimaan Peserta Didik Baru sehingga diperoleh calon peserta didik yang bermutu.
- c. Bagi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, hasil penelitian dapat dijadikan masukan dalam rangka Pengelolaan Penerimaan Peserta Didik Baru.

E. Daftar Istilah

1. Pengelolaan/Manajemen adalah serangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi dengan melakukan kegiatan dari empat fungsi utama yaitu merencanakan (*planning*), mengorganisasi (*organizing*), melaksanakan (*actuating*), dan mengendalikan (*controlling*).
2. Istilah Penerimaan Siswa Baru (PSB) sama dengan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
3. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) , merupakan serangkaian kegiatan mulai dari promosi atau tahap persiapan, pendaftaran, proses seleksi, pengumuman dan daftar ulang. Dalam hal ini Penerimaan Peserta Didik Baru di SMP 1 Randublatung Kabupaten Blora Tahun Pelajaran 2009/2010.
4. “Promosi” berdasarkan kamus besar Bahasa Indonesia berarti : “Perkenalan (dalam rangka meningkatkan usaha, dagang dan sebagainya) hendaknya dilakukan secara intensif dan terus menerus”. Hal ini merupakan bagian awal atau persiapan pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru.

5. SMP SSN adalah SMP yang hampir atau telah memenuhi delapan (8) Standar Nasional Pendidikan mencakup standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana-prasarana, manajemen, pembiayaan, dan penilaian pendidikan.
6. SMP 1 Randublatung Kabupaten Blora dinyatakan sebagai Sekolah Standar Nasional (SSN) berdasarkan SK Direktur PLP No. 960/C3/KP/2005 Tanggal 19 Juli 2005.
7. SMP 1 Randublatung terletak di Jalan Diponegoro No. 19 Randublatung Telp. (0296) 810020 KP.58382 Blora.